II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat dapat dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelsaian masalah yang sedang terjadi.

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi, sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjabarkan pada masyarakat pelayanan apa yang menjadi haknya, siapa yang

bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Kebijakan publik menurut Anderson, yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.[1] Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah. Pendapat Edwards III yang menyatakan bahwa "Kebijakan Negara adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah", sehingga suatu kebijakan tidak hanya suatu tindakan yang diusulkan tetapi juga yang tidak dilaksanakan.[2] Demikian pula pendapat Thomas Dye yang mengatakan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.[3] Selain itu, kebijakan publik menurut Friedrich bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.[4]

---

[1] M. Irfan Islamy, 2001*, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta. 2001, hlm 17
[2] *Ibid,* hlm. 18
[3] Subarsono, A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik.* Pustaka Pelajar. Jakarta. 2005, hlm. 2
[4] Leo Agustino, *Dasar-dasar kebijakan publik*, Alfabeta, Bandung. 2008, hlm 7

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan publik di atas, maka disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaanya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi, hal ini sejalan dengan pendapat *Easton* bahwa kebijakan mengandung nilai paksaan yang secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.[5]

Mengidentifikasi dari tujuan yang ingin dicapai haruslah memahami isu atau masalah publik, dimana masalahnya bersifat mendasar, strategis, menyangkut banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan, dengan taktik dan startegi maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada, rumusan kebijakan merupakan bentuk perundang-undangan, setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik di implementasikan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat.

[5] *Ibid.* hlm 19

2. Tahap – Tahap Kebijakan Publik

Menurut Winarno mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:[6]

a) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

---

[6] Winarno Budi, 2002. Kebijakan Publik Teori & Prsoses, Jakarta: Buku Kita. 2012, hlm 35

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksana-kan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan UU. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan UU di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Disisi lain, implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang

mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*output*), dampak (*outcomes*), dan manfaat (*benefit*), serta dampak (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berati *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).[7] Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan.[8] Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Menurut Ripley dan Franklin juga berpendapat bahwa

---

[7] S. Wahab, *Analisis Kebijakasanaan: Dari formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara*. Bumi aksara. Jakarta. 2005, hlm 64

[8] Joko Widodo, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya. 2001, hlm 192

implementasi adalah apa yang terjadi setelah UU ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).[9] Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah yang mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Sementara itu, menurut Grindle bahwa tugas implementasi adalah memebentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.[10] Sedangkan pengertian implementasi dijelaskan menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.[11] Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan–pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari UU, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Sejalan dengan kutipan di atas maka menurut Lester dan Stewart dimana mereka mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*).[12]

---

[9] Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori & Prsoses, Buku Kita, Jakarta. 2002, hlm 148-149
[10] Budi Winarno, loc. Cit.
[11] *Ibid.*
[12] Leo Agustino, op. cit. hlm 139

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang baik atau buruk bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai implementasi, peneliti menginterpretasikan bahwa implementasi biasanya menunjukkan seluruh upaya untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan atau program. Dengan membuat kebijakan tersebut pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap suatu kebijakan atau program yang akan dirasakan oleh masyarakatnya. Karena implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, sebab melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Implementasipun akan menghasilkan suatu akibat dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap suatu keputusan kebijakan yang akan dicapai dalam tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

C. Model Implementasi Kebijakan

Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan dan saling membentuk. Implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Dalam analisis kebijakan pubik telah banyak dikembangkan model-model yang membahas tentang implementasi kebijakan, untuk menganalisis bagaimana proses tersebut berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan.

Pada sejarah perkembangan implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up*. Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya. Sekalipun banyak *scholar* yang menganut aliran *top down*, namun dalam hal ini hanya akan menguraikan beberapa model implementasi kebijakan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi berbagai pemikiran maupun tulisan para ahli. Berikut beberapa model-model implementasi kebijakan dari berbagai ahli :[13]

1. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan *top down* yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation.* Proses implementasi ini

[13] Leo Agustino, *op. cit*, hlm 141

merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerj kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kebijakan publik tersebut, adalah:

1.1 Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas engan sosio-ukur yang ada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

1.2 Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya financial dan sumberdaya waktu.

1.3 Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen

pelaksana. Semakin luas cakupan imlementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

1.4 Sikap/kecendrungan (*disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasaalahan yang mereka raakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

1.5 Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.

1.6 Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Sejauh mana lingkungan eksternal urut mendorong keberhasilan kebijakan publikyang telh ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2. Model yang dikembangkan oleh George C. Edward III

Pada model ini menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:[14]

2.1 Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikominukasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Hal tersebut dapat berjalan apabila komuniksi berjalan dengan baik . Secara umum tiga hal yang penting dalam indikator ini yaitu: transmisi, konsisten, dan kejelasan.

2.2 Sumber daya

Berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Sumber daya manusia sebagai implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi untuk melakukan tindakan dan berkompeten dibidangnya. Secara umum empat hal yang penting dalam indikator ini yaitu: staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

---

[14] Leo Agustino, *op. cit*, hlm 150

2.3 Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Jika pelakasanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka implementor kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemapuan untuk melaksanakannya. Secara umum dua hal yang penting dalam indikator ini yaitu: pengangkatan birokrat dan insentif.

2.4 Struktur Organisasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implentasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisai, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Tabel 2 Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif Implementasi Kebijakan

Aspek	Ruang Lingkup
Komunikasi	a.Implementor dan kelompok sasaran dari program/kebijakan b.Sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan - Metode yang digunakan

	- Intensitas Komunikasi
Sumber Daya	a.Kemampuan Implementor - Tingkat pendidikan - Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program - Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan b.Ketersediaan Dana - Dana yang dialokasikan - Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan
Disposisi	Karakter Pelaksana a. Tingkat komitmen dan kejujuran dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan.Semakin sesuai dengan standar semakin tinggi komitmennya. b. Tingkat demokratis dapat dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dan masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan standar guna mencapai tujuan dan sasaran program.
Struktur Birokrasi	a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami b. Struktur organisasi, rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit , birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan program.

Sumber: Indiahono (2009,34)

3. Model yang dikembangkan oleh Merilee S, Grindle

Model ini dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukurdari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin ingin diraih yang tediri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.[15]

[15] Leo Agustino, *op. cit*, hlm 154

3.1 *Content of Policy*

a Kepentingan yang mempengaruhi

Indicktor ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejumlah kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b Tipe manfaat

Pada poin ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaksan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasia kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c Derajat perubahan yang ingin dicapai

Pada poin ini berupaya seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada poin ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e Pelaksanaan program

Dalam menjalankan suatu program atau kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f Sumber daya yang digunakan

Pelaksanaan kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

3.2 *Context of Policy*

a Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi ang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan gagal.

b Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Lingkungan diaman suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Hal lain yang diarasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Melalui pemaparan model-model implementasi diatas, peneliti mengadopsi model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh Edward III. Model

implementasi inilah yang akan digunakan penulis di lapangan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung. Alasan penulis menggunakan model ini karena variabel ataupun indikator yang dikemukakan oleh Edward III merupakan variabel yang bisa menjelaskan secara kongkret dalam menjelaskan proses implementasi kebijakan yang sebenarnya.

D. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pembangunan sektor ekonomi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berlangsung dengan berbarengan. Suatu rumusan nasioanal, istilah pendidikan menurut UU RI Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1 Pasal 1: Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pada rumusan ini perlu digarisbawahi dengan usaha sadar dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan berdasarkan rencana yang rasional-objektif. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan ini untuk menjalankan keseharian manusia. Pendidikan juga

bertujuan agar rmanusia dapat memahami segala hal yang terjadi dalam proses berlangsungnya hidup manusia.[16]

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka memepengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pengajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan. Pada dasarnya pertumbuhan peserta didik bergantung pada dua unsur yang saling mempengaruhi, yakni bakat yang dimiliki oleh peserta didik sejak lahir dan lingkungan yang mempengaruhi hingga bakat itu tumbuh dan berkembang. Sekola sebagai suatu lembaga pendidikan formal, secara sistematis merencanakan bermacam-macam lingkungan, yakni lingkungan pendidikan yang menyediakan berbagai kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan belajar. Dengan berbagai kesempatan belajar itu, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik diarahkan dan didorong kepencapaian tujuan yang dicita-citakan. Lingkungan tersebut disusun dan ditata dalam suatu kurikulum, yang pada gilirannya dilaksanakan dalam bentuk proses pembelajaran.[17]

Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti

---

[16] Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta. 2005 hlm 2
[17] *Ibid.* hlm *3*

program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun di sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi.

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi :

1.1 Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan ini diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

1.2 Pendidikan menengah yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan ini diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Fungsi pendidikan menengah umum mempersiapkan untuk mengikuti pendidikan tinggi. Sedangkan fungsi pendidikan menengah kejuruan adalah mempersiapkan untuk memasuki lapangan kerja sesuai dengan pendidikan kejuruan yang diikutinya atau mengikuti pendidikan keprofesian pada tingkat pendidikan tinggi.

1.3 Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah lanjutan pendidikan menengah yang dipersiapkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan

formal berstatus swasta. Pendidikan jalur formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya termasuk didalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui

proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan pengertian pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jenis pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

3. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi Pendidikan merupakan suatu proses yang kontinyu. Ia merupakan pengulangan yang perlahan tetapi pasti dan terus-menerus sehingga sampai pada bentuk yang diinginkan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia untuk berupaya mengembangkan pola pikir dan usaha mengetahui hal yang berkaitan dengan kehidapan demi kemajuan hidup

manusia itu sendiri, serta pentingnya pendidikan dalam kehidupan yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga dalam bertingkah laku dan di luar lingkungan keluarga.

Tujuan dari pendidikan merupakan hal yang pasti diinginkan oleh setiap masyarakat dalam pengembangan daya pikir dan menambah wawasan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari hari. Dengan berbagai kesempatan itu, maka pertumbuhan dan perkembangan peserta didik diarahkan dan didorong kepencapaian tujuan yang dicita-citakan. Lingkungan tersebut disusun dan ditata dalam suatu kurikulum, yang pada gilirannya dilaksanakan dalam bentuk proses pembelajaran.

E. Pengertian Kurikulum

Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin, yakni *Curriculei*, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada zaman dahulu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijzah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu.

Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka didalam penyusunannya memerlukan landasan atau fondasi yang kuat, melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam. Kurikulum merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional yang otomatis diimplementasikan tidak akan efektif dengan sendirinya meskipun rumusannya telah diimplementasikan optimal. Kurikulum memerlukan perangkat sub sistem lainnya untuk dapat bergerak di dalam rangkaian kegiatan mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program itu para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah matapelajaran saja, melainkan meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa, seperti: bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan, perpustakaan, gambar-gambar dan halaman sekolah yang memungkinkan dpat belajar lebih efektif. Suatu pendapat sehubungan dengan pngertia diatas, sebagai berikut:

"*Curriculum is interpreted to mean all of the organized course, activities and experiences which pupils have under direction of the school, whether in the classroom or not.*"(Kurikulum yang ditafsirkan berarti untuk semua

matapelajaran yang diselenggarakan, kegiatan dan pengalaman yang siswa miliki di bawah arahan sekolah, baik di kelas atau tidak) Romine (1945:14)[18]

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada dasarnya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (Bab 1, Pasal 1 Butir 9). Isi kurikulum merupakan susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan, dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional (Pasal 39).[19]

Kurikulum sebagai suatu sistem keseluruhan memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yakni:[20]

1. Tujuan Kurikulum

Tujuan kurikulum tiap satuan pendidikan harus mengacu kearah peencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam skala yang lebih luas, kurikulum merupakan suatu alat pendidikan dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas. Kurikulum menyediakan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk mengalami proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai target tujuan pendidikan nasional khususnya dan sumberdaya manusia

---

[18] Oemar Hamalik, *Kurikulum dan pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta. 2005, Cet ke 5, hlm 17
[19] *Ibid.* hlm 18
[20] *Ibid.* hlm 24

yang berkualitas. Matapelajaran dikelompokkan menjadi beberapa bidang studi, yakni:

a Bidang studi Bahasa dan Seni

b Bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial

c Bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam

d Bidang studi Pendidikan jasmani dan Kesehatan

Setiap matapelajaran mempunyai tujuan sendiri dan berbeda dengan tujuan yang hendak dicapai oleh matapelajaran lainnya. Tujuan matapelajaran merupakan penjabaran dari tujuan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasioanal. Berdasarkan tujuan umum maupun tujuan khusus, selanjutnya dapat ditetapkan/direncanakan materi peajaran.

2. Materi Kurikulum

Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum. Dalam UU Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa, isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan rumusan tersebut, isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a Materi kurikulum berupa bahan pelajaran terdiri dari bahan kajian atau topiktopik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses pembelajaran.

b Materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan.

c Materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

3. Metode

Metode adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Suatu metode mengandung pengertian terlaksannya kegiatan guru dan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran menempati fungsi yang penting dalam kurikulum, karena memuat tugas-tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa dan guru. Maka dari itu, penyusunan hendaknya berdasarkan analisa tugas yang mengacu pada tujuan kurikulum dan berdasarkan perilaku awal siswa. Dalam hubungan ini, ada tiga alternative pendekatan yang dapat digunakan, yakni:

a Pendekatan yang berpusat pada matapelajaran, dimana materi pembelajaran terutama bersumber dari matapelajaran. Penyampaiannya dilakukan melalui komunikasi antar guru dan siswa. Guru sebagai penyampai pesan atau komunikator, siswa sebagai penerima pesan.

b Pendekatan yang berpusat pada siswa. Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, minat dan kemampuan siswa.

c Pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat. Pendekatan ini bertujaun mengintegrasikan sekolah dan masyarakat dan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

4. Organisasi Kurikulum

Organisasi kurikulum terdiri dari beberapa bentuk, yang masing-masing memiliki cirri-cirinya sendiri.

a Matapelajaran terpisah-pisah

Kurikulum terdiri dari sejumlah matapelajaran yang terpisah-pisah, seperti: Sejarah, Ilmu Pasti, Bahasa Indonesia dan sebagainya. Tiap matapelajaran disampaikan sendiri-sendiri tanpa ada hubungannya dengan matapelajaran lainnya.

b Matapelajaran berkorelasi

Korelasi diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan matapelajaran. Prosedur yang ditempuh ialah menyampaikan pokok-pokok yang saling berkorelasi guan memudahkan siswa memahami pelajaran tersebut.

c Bidang studi

Beberapa matapelajaran yang sejenis dan memiliki cirri-ciri yang sama dikorelasikan/difungsikan dalam satu bidang pengajaran.

d Program yang berpusat pada anak

Program ini adalah berorientasi baru dimana kurikulum dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik, bukan pada matapelajaran.

e *core programe*

core programe adalah suatu program inti berupa unit atau masalah. Beberapa matapelajaran diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalah tersebut.

f *Electric Program*

Electric program adalah suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Program ini sesuai dengan minat, kebutuhan dan kematangan peserta didik.

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu komponen kurikulum, karena kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Aspek-aspek yang perlu dinilai bertitik tolak dari aspek-aspek tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan kurikulum, tujuan pembelajaran dan tujuan belajar siswa. Setiap aspek yang dinilai berpangkal pada kemampuan-kemampuan apa yang hendak dikembangkan, penetapan aspek yang dinilai mengacu pada kriteria keberhasilan yang telah ditentuka dalam kurikulum tersebut. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh instrume penilaian, ialah: validitas, reliabilitas, objektivitas, kepraktisan, pembedaan, syarat-syarat ini dijelaskan lebih lanjut pada evalusi belajar dan pembelajaran. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting, baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan.

Menurut E. Mulyasa dalam Immas Kurniasih dan Berlin Sani (2004:13) mengungkapkan bahwa keberhasilan sebuah kurikulum yang baik haruslah melalui tahap berikut ini:[21]

a. Adanya sosialisasi yang menyeluruh, sosialisasi yang terstruktur dan sistematis akan sangat menunjang kemudahan dalam memahami kurikulum yang ditawarkan agar implementasi kurikulum yang baru dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.
b. Selalu menghadirkan lingkungan yang kondusif, sekolah sebagai sarana pendidikan haruslah menjadi tempat yang kondusif, aman, nyaman dan tertib serta optimis yang selalu diiringi oleh harapan yang tinggi dari seluruh warga sekolah.
c. Selalu mengembangkan fasilitas dan sumber belajar, fasilitas dan sumber belajar tentu saja akan membantu mempercepat proses tercapainya tujuan dari kurikulum tersebut seperti, laboratorium, pusat sumber belajar dan perpustakaan. Pendayaguanaan fasilitas dan sumber belajar dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar siswa.
d. Memupuk dan selalu mengembangkan kemandirian sekolah, hal ini lebih identik dengan mengembangkan kemandirian kepala sekolah, terutama dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dalam menyelaraskan semua sumberdaya pendidikan yang tersedia serta memberikan arahan dalam mengimplementasikan kurikulum yang baru.
e. Meluruskan paradigm (pola pikir) guru, untuk hal ini semua guru perlu diberikan sebuah pelatihan serta penataran khusus mengenai bagaimana

[21] Immas kurniasih&berlin sani, *Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan*, Kata Pena, Surabaya. 2014, Cet ke 4, hlm 7

pelaksanaan kurikulum baru tersebut. Sehingga, guru sebagai pihak yang paling banyak menghabiskan waktu di kelas selama proses pembelajaran lebih mengerti dan paham dengan kurikulum.

f. Memberdayakan semua tenaga kependidikan, dalam hal ini manajemen tenaga kependidikan adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan tenaga-tenaga kependidikan dapat membaca perubahan tersebut, sehingga semua bisa berjalan secara efektif dan efisien demi mencapai hasil yang optimal

Jadi kurikulum merupakan sebuah rancangan dalam dunia pendidikan sebagai komponen utama dalam pembelajaran dan proses pengembangan sistem belajar yang ada pada institusi pendidikan yang bertujuan memberikan dukungan terhadap sistem pembelajaran terhadap siswa atau peserta didik. Selain itu juga, kurikulum sebagai pedoman dalam pelaksanaan atau pengawasan bagi tenaga pendidik. Sedangkan untuk orang tua, digunakan sebagai pedoman dalam memberikan bimbingan pembelajaran anak di rumah Oleh karena itu, sebagai acuan kegiatan pendidikan, dibutuhkan landasan yang kuat dan dilakukan penelitian yang intensif. Kurikulum sangat fundamental dan menggambarkan posisi sesungguhnya kurikulum dalam suatu proses pendidikan. Dalam sejarah kurikulum Indonesia telah berulang kali melakukan penggantian kurikulum seperti :[22]

[22] Suparlan, *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran*, Bumi Aksara. Jakarta. 2011, hlm 85

a Tahun 1947-Leer Plan (Rencana Pelajaran)

Menteri pendidikan , Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Suwandi membentuk panitia penyelidik pengajaran yang antara lain melahirkan Rencana Pelajaran 1947. Pada tahun ini Istilah kurikulum belum digunakan, istilah yang digunakan adalah Rencana Pelajaran. Rencana Pelajaran 1947 merupakan kurikulum pertama di Indonesia. Rencana Pelajaran ini disusun harus memerhatikan; (1) mengurangi pendidikan pikiran, (2) menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, (3) memberikan perhatian kepada kesenian, (4) meningkatkan pendidikan watak, (5) meningkatkan pendidikan jasmani dan (6) meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Unsur pokok kurikulum pada Rencana Pelajaran 1947 adalah daftar jam pelajaran atau struktur program dan garis-garis besar program pengajaran. Struktur program dibagi menjadi (1) struktur program yang menggunakan bahasa pengantar yaitu Bahasa Daerah (2) struktur programyang menggunakan bahasa pengantar yaitu Bahasa Indonesia. Kurikulum tersebut termasuk kurikulum dengan matapelajaran terpisah-pisah.

b Tahun 1950-Rencana Pelajaran Terurai

Kurikulum ini lahir karena tuntutan kelahiran UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Kurikulum ini masih relatif sama dengan Rencana Pelajaran 1947. Istilah kurikulum juga masih belum digunakan, istilah yang dipakai Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini merupakan kurikulum dengan matapelajaran terpisah-pisah.

c Tahun 1958-Rencana Pelajaran

Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari Rencana Pelajaran Terurai 1950. Pada tahun ini mengalamu perubahan, sehingga yang semula diorientasikan kepada kepentingan kolonial maka kini diubah selaras dengan kebutuhan bangsa yang merdeka. Kurikulum ini digunakan sampai dengan tahun 1964

d Tahun 1964- Rencana Pelajaran 1964

Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari Rencana Pelajaran Terurai 1958. Kurikulum ini digunakan sampai dengan tahun 1968. Pada kurikulum ini terdapat pembagian kelompok cipta, rasa, karsa dan krida.

e Tahun 1968-Kurikulum 1968

Kurikulum ini merupakan kurikulum terpadu pertama di Indonesia. Beberapa matapelajaran Ilmu Hayat, Ilmu Alam dan sebagainya mengalami perubahan menjadi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau yang sekarang sering disebut Sains. Struktur program dibagi menjadi 3, yakni:

(1) Pembinaan jiwa pancasila

Struktur program untuk sekolah dasar, program pembinaan jiwa pancasila, meliputi matapelajaran: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa daerah dan Pendidikan Olahraga.

(2) Pengetahuan dasar

Untuk program pengetahuan dasar meliputi matapelajaran: berhitung, IPA, pendidikan kesenian dan pendidikan kesejahteraan keluarga.

(3) Kecakapan khusus

Untuk program kecakapan khusus meliputi matapelajaran pendidikan khusus.

f Tahun 1975-Kurikulum 1975

Kurikulum ini lahir sebagai tuntutan ketetapan MPR nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN 1973, dengan tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia Indonesia untuk pembangunan nasional diberbagai bidang. Dalam Kurikulum 1975, Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dikenal dengan format yang sangat rinci.

g Tahun 1984-Kurikulum 1984

Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975. Oleh karena itu Kurikulum 1984 dikenal juga sebagai Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 berlaku berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1983 tanggal 22 Oktober 1983 tentang perbaikan kurikulum. Ada empat aspek yang disempurnakan dalam Kurikulum 1984, yakni:

(1) Pelaksanaan PSPB
(2) Penyesuaian tujuan dan struktur program kurikulum
(3) Pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan keserasian antara ranah kognatif, afektif dan psikomotorik.

(4) Pelaksanaan pelajaran berdasarkan belajar yang disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing peserta didik.

h Tahun 1994 dan 1999-Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum ini dilaksanakan berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tanggal 25 februari 1993. Kurikulum 1994 berisi 3 lampiran: pengembangan kurikulum, GBPP dan pedoman pelaksanaan kurikulum.

i Tahun 2004-Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2005, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mempunyai kewenangan untuk mengembangkan standar nasional pendidikan, termasuk standar kurikulum yang digunakan disekolah-sekolah.

j Tahun 2006-Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KBK sering disebut dengan jiwa dari KTSP, karena KTSP sesungguhnya proses kaidah-kaidah yang terdapat dalam KBK. KTSP disusun oleh satuan pendidikan sekolah bersama dengan semua pemangku kepentingan disekolah dengan mengacu kepada standar isi dan proses dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar isi dan proses yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum ini dikembangkan oleh BSNP.

k Tahun 2013-Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang lebih menekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan dan penegtahuan. Ada pun cirri kurikulum 2013 yang paling mendasar ialah:[23]

(1) Menuntut kemampuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang telah mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan tekhnoligi dan informasi.

(2) Siswa lebih didorong untuk memiliki tanggung jawab kepada lingkungan, kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki kemampuan berpikir kritis.

(3) Memiliki tujuan agar terbentuknya generasi produktif, kreatif, inovatis dan afektif.

(4) Pelajaran IPA dan IPS diajarkan dalam matapelajaran Bahasa Indonesia

Hal yang merupakan perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, maupun global. Terlihat ditingkat SD, penerapan sikap masih dalam ruang lingkup lingkungan sekitar, sedangkan untuk tingkat SMP penerapan sikap dituntut untuk diterapkan pada lingkungan pergaulannya dimanapun ia berada. Sementara itu, untuk tingkat SMA atau SMK, dituntut memiliki sikap kepribadian yang mencerminkan kepribadian bangsa dalam pergaulan dunia.

[23] Immas kurniasih&berlin sani, *Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan*, Kata Pena, Surabaya. 2014, Cet ke 4, hlm 22

F. Tinjauan Tentang Kajian Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini akan mengangkat tema tentang kebijakan Kurikulum 2013, dengan judul " **Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung.** Dalam melakukan penelitian ini perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Disini peneliti mengambil dua hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pembanding dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan Implementasi kebijakan Kurikulum 2013. Terdapat duaa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013.

Penelitian yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Ade Risna Sari yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama negeri 10 Di Kota Pontianak"** Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Ade Risna Sari mengangkat tema tentang kebijakan Kurikulum 2013 yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ade Risna Sari permasalahan yang dibahas adalah mengenai kesiapan guru dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 10 kota Pontianak yang dikaji dari aspek komunikasi,

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 10 kota Pontianak. Pendekatan peneltian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan dan observasi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut yaitu bahwa sosialisasi dan pelatihan guru tentang kurikulum 2013 belum cukup bahkan masih banyak guru yang belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan sehingga hakikat dan esensi kurikulum 2013 belum dapat dipahami secara utuh. Maka, Departemen Pendidikan Kota Pontianak perlu mengadakan pelatihan yang lebih intensif dan maksimal lagi kepada para guru secara menyeluruh supaya guru-guru lebih dapat memahami esensi, hakikat dan tujuan kurikulum 2013 dan segera melengkapi buku pegangan guru dan buku-buku teks kurikulum 2013.

Penelitian yang kedua, jurnal yang ditulis oleh Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd yang berjudul "**Kurikulum 2013 Konsepsi, Implementasi dan Peran Kepala Sekolah"** Pengawas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan serta sebagai Dosen pada Program Sarjana dan Pascasarjana di Universitas Kuningan. Lulusan terbaik Program Doktor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung) tahun 2008. Penulis Buku, Peneliti dan Trainer dalam Pengembangan SDM Pendidikan, juga seorang Konsultan Pembangunan. Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd mengangkat tema tentang kebijakan Kurikulum 2013 yang merupakan kurikulum pendidikan atau pembelajaran untuk persekolahan dari mulai Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah, dalam konteks sistem

Pendidikan di sekolah kurikulum 2013 merupakan perbaikan atau perubahan dalam standar isi yang berimplikasi pada standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian, jadi dilihat dari standar-standar nasional pendidikan yang 8 standar (**standar isi; standar proses; standar kompetensi lulusan;** standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana;standar pengelolaan;standar pembiayaan; **standar penilaian pendidikan**) perubahan terjadi pada 50% standar nasional pendidikan.

Pada penelitian yang ditulis oleh Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd permasalahan yang dibahas adalah mengenai perubahan yang perlu dilakukan dalam hal standar lainnya, terutama dalam kompetensi Tenaga Pendidik, karena kurikulum bukan sekedar teks, tapi juga konteks, dimana guru akan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaannya (kepala sekolah). Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perubahan yang dilakukan dalam hal standar pada kebijakan kurikulum 2013 dan kesiapan tenaga pengajar (*stakeholder*) dalam menghadapi kurikulum 2013 karena tenaga pengajar merupakan ujung tombak dalam pelaksanaannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut yaitu bahwa kesiapan *stakeholder* tentang kurikulum 2013 belum cukup, bahkan masih banyak guru yang belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan sehingga hakikat dan esensi kurikulum 2013 belum dapat dipahami secara utuh. Maka, kontek keterlaksanaannya peran penjelasan dan pengarahan

serta penyelarasan menjadi amat penting agar implementasi kurikulum 2013 dapat berproses sesuai dengan yang diharapkan serta dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kurikulum 2013. Tanpa itu maka sebenarnya kurikulum 2013 hanya akan menjadi dokumen yang mati, tanpa dilaksanakan oleh guru sebagai *living curriculum* serta tanpa *disupirvisi* secara *Factual* akurat oleh kepala sekolah.